BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di ambil dari jurnal jurnal penelitian yang berhubungan dengan judul yang akan di teliti :

1. Penelitian Oleh (Sugianor, 2024) dengan judul "partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan tani Desa Mendik Bhakti Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur", Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Tani Desa Mendik Bhakti Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

   Hasil dari penelitian menunjukan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Tani Desa Mendik Bhakti Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kurang baik dilihat dari beberapa aspek kehadiran rapat, keaktifan diskusi, saran dan kritik, pelaksanaan dalam bentuk uang, pelaksanaan dalam bentuk materi, dan masyarakat dalam memilihara hasil pembangunan. Adapun aspek yang sudah berjalan baik yaitu Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil bangunan. Faktor penghambat diantaranya kesibukan dalam pekerjaan, Kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan tani dan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya paertisipasi dalam pembangunan. Dan untuk , faktor pendukung yaitu Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Gotong Royong dan Adanya Pembangunan Jalan Tani Yang Memberikan Manfaat Besar Untuk Masyarakat. Agar Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Tani Desa Mendik Bhakti Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur terlaksana secara baik, disarankan kepada Kepala Desa Mendik Bhakti agar melakukan evaluasi terhadap program penyelenggaran pembangunan sehingga masyarakat akan lebih banyak yang ikut berpartisipasi.

2. Penelitian Oleh (Rijali, 2021) yang berjudul ‘’Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong’’, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Dilihat Dari Partisipasi Tenaga di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan membuat tabel dan persentasi untuk menjelaskan tingkat Partisipasi Masyarakat.

   Dalam Pelaksanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Dilihat Dari Partisipasi Tenaga. Pengukuran tingkat partisipasi menggunakan Skala Liker, Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai bulan Juli 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari wawancara mendalam secara langsung kepada 5 orng responden dengan menggunakan wawancara terstruktur dan data sekunder diperoleh dari Kantor Pemerintahan Desa Bintang Ara. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Key informan dan informan berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Kasi Pembanguna, Wahyudi, A. Syarif, dan Hidayat. Analisis data yakni menggunakan model penelitian interaktif dengan tiga prosedur yaitu: kondensasi data,display data atau penyajian data, dan conclusions drawing atau verifiying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Bintang Ara dilihat dari partisipasi tenaga dalam pelaksanaan pembangunan jalan menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berada pada skala persentase 64,5% termasuk pada kategori Sangat Berpartisipasi dengan indikator kehadiran secara fisik berada pada skala persentase yang lebih tinggi yaitu 73% termasuk pada kategori Sangat Berpartisipasi. Sedangkan, indikator keterlibatan secara fisik dengan skala persentase lebih rendah yaitu 56% termasuk pada kategori Berpartisipasi.

3. Penelitian Oleh (Mesy, 2021) yang berjudul ''Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastrukur Jalan Tani di Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur'', Tujuan Penelitian ini adalah untuk mrngetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastrukur jalan usaha tani.Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuliatatif,yang merupakan suatu prosedur penelitian yang digunakan menggunakan Data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang

dan pelaku yang dapat diamati. Hasil penelitian tingkat paratisipasi terhadap pembangunan jalan tani menuju persawahan sudah baik.

4. Penelitian Oleh (Simullang, 2019) yang berjudul ''Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan infrastrukur Jalan Di RT 03 Jalan Poros Kebon Agung Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara''. Pembangunan infrastrukur jalan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi permasalahannya adalah pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat disebagian daerah memunculkan berbagai ide atau gagasan untuk melakukan swadya sebagai bentuk partisipasinya dalam pembanguan infrastrukut, permasalahannya tidak semua masyarakat terkibat secara mental dan fisik (tenaga) didalam berpartisipasi,padahal pada dasar dari sebuah partisipasi adalah kesukarelaan atau ikut keikutsertaan seluruh anggota masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi dari masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastrukur jalan RT 03 Jalan Poros Kebon Agung.

   Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dekriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan sumber data primer yaitu, dengan cara wawancara dan observasi serta sumber data sekunder yaitu, dengan cara dokumentasi. Menurut (Simullang, 2019) partisipasi masyarakat kurang maksimal, dapat dilihat pada tahap pelakasanaan dari bentuk sumbangan partisipasi masyarakat yang diberikan berupa partisipasi buah pikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda dan partisipasi uang.

5. Penelitian oleh Stepanus Francisco (2015)‘’Partisipasi masyrakat dalam pembangunan Infrastukur di Desa Marunsu Kecamatan Samalanta Kabupaten Bengkayang’’. Dengan hasil penelitian Stepanus Francisco (2015) ini yang menunjukan bawah partisipasi masyarakat Desa Marunsu dalam tahap pelaksanaan pembangunan infrastruuktur jalan desa kurang maksimal, dapat dilihat dalam bentuk jenis sumbangan partisipasi masyarakat yang diberikan berupa partisipsi buah pikiran, partisipasi kertampilan, partisipasi tenaga, Partisipasi harta benda dan partisipasi uang.Karena Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan infrastuktur di Desa Marunsu tergolong rendah. Rendahnya partisipasi masyarakata tersebut merupakan suatu tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintahan Desa Marunsu dengan berusaha memcari solusi untuk lebi meningkatkan kesadaran masyratakat untuk suka rela berpartisipasi atau ikut aktid berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Marunsu. Dibutuhkan pula adanya beberap perhatian khusus dari pemerintah Desa Marunsu untuk memotivasi serta berusaha mengajak masyarakat untuk meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam tahap pelakasanaan pembangunan infrastukur jalan usaha tani di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan.

B. Landasan Teori

1. Paradigma Administrasi Publik

a) *Old Public Administration* (OPA)

Paradigma *Old Public Administration* (OPA) merupakan paradigma klasik dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya struktur birokrasi yang hierarkis, pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur formal dalam organisasi pemerintahan. Pendekatan ini menempatkan birokrasi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan menciptakan sistem administrasi yang teratur, rasional, serta mampu menjalankan berbagai program pemerintah secara efektif dan terkoordinasi (Bouckaert, 2020).

Dalam paradigma ini, organisasi pemerintahan disusun berdasarkan struktur hierarki yang jelas sehingga setiap unit kerja memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Pembagian tugas yang sistematis serta penerapan aturan formal yang ketat diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi yang tertib dan terorganisasi dengan baik. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjalankan berbagai program pembangunan secara efektif serta menjaga stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bouckaert, 2020).

Namun demikian, paradigma ini seringkali mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan pada prosedur administratif yang kaku. Orientasi yang terlalu kuat pada aturan formal seringkali menyebabkan birokrasi menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan

kebutuhan masyarakat. Akibatnya, proses pelayanan publik dapat menjadi lambat serta kurang responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat (Denhardt, 2003).

b) *New Public Management* (NPM)

Paradigma *New Public Management* (NPM) muncul sebagai respon terhadap berbagai kelemahan paradigma birokrasi tradisional yang dianggap kurang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Paradigma ini menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan administrasi publik. Dalam pendekatan ini, berbagai prinsip manajemen yang berkembang di sektor swasta mulai diterapkan dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan (Bouckaert, 2020).

Melalui paradigma ini, pemerintah didorong untuk lebih berorientasi pada pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pendekatan New Public Management juga menekankan pentingnya pengukuran kinerja organisasi, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemberian kewenangan yang lebih luas kepada unit kerja untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan adanya pendekatan ini, birokrasi diharapkan dapat bekerja secara lebih profesional, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Suganda, 2025).

c) *New Public Service* (NPS)

Paradigma New Public Service (NPS) berkembang sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam paradigma ini, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai pengguna layanan publik, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih partisipatif antara pemerintah dan masyarakat (Denhardt, 2003).

Pendekatan New Public Service menekankan bahwa peran utama pemerintah adalah melayani masyarakat dengan cara memfasilitasi partisipasi publik serta membangun dialog antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan layanan secara efisien, tetapi juga harus mampu menciptakan ruang kolaborasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik (Denhardt, 2003).

2. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara

umun pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya (Latif, 2019).

Menurut Aprillia Theresia dkk. (2015:3), pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan, sedangkan menurut Jacobus Ranjabar (2015:130), teori mula tentang pembangunan ditandai oleh kenyataan bahwasanya konsep pembangunan dianggap sama dengan pertumbuhan ekonomi. Rochajat Harun, (2012:3), secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan menurut Siagian dalam Nurman (2015:87) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Mardiakanto Totok dan Soebiato Poerwoko, (2015:3), pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan ini.

b. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan desa karena infrastruktur menjadi sarana yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat desa. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, kegiatan ekonomi masyarakat desa dapat berkembang secara lebih optimal (Solekhan, 2021).

Selain mendukung kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan. Infrastruktur yang baik dapat mempermudah masyarakat desa untuk memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan (Widjaja, 2021).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta penguatan kelembagaan masyarakat desa. Melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa diharapkan mampu

mengembangkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (Nurcholis, 2021).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka (Solekhan, 2021).

d. Pengembangan Potensi Lokal Desa

Setiap desa memiliki potensi lokal yang berbeda-beda, baik dalam bidang pertanian, perikanan, pariwisata, maupun usaha mikro. Potensi lokal tersebut dapat menjadi sumber ekonomi yang penting bagi masyarakat desa apabila dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan potensi lokal menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan desa (Widjaja, 2021).

Pengembangan potensi lokal dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pengembangan usaha mikro, pengelolaan potensi wisata desa, serta peningkatan kualitas produk lokal. Dengan adanya pengembangan potensi lokal yang baik, masyarakat desa dapat memperoleh sumber pendapatan yang lebih beragam sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Nurcholis, 2021).

e. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan

yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur desa, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa. Dengan adanya pembangunan desa yang terarah, masyarakat desa diharapkan dapat menikmati berbagai fasilitas pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka (Solekhan, 2021).

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan antara wilayah desa dan perkotaan. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota seringkali terjadi karena keterbatasan akses masyarakat desa terhadap berbagai fasilitas pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan (Widjaja, 2021).

Pembangunan desa juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (Nurcholis, 2021).

a) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi serta aktivitas sosial masyarakat desa (Solekhan, 2021).

b) Mengurangi Ketimpangan Pembangunan

Pembangunan desa juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota melalui penyediaan berbagai fasilitas pembangunan yang merata di seluruh wilayah (Widjaja, 2021).

c) Mendorong Kemandirian Desa

Kemandirian desa menjadi salah satu tujuan penting pembangunan desa karena desa diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri serta mengembangkan berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis, 2021).

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Desa

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam desa maupun dari luar desa yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam menentukan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan desa agar program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Solekhan, 2021).

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Apabila pemerintah desa mampu mengelola potensi yang dimiliki secara baik serta didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi, maka pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan (Widjaja, 2021).

1) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan desa. Desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan, maupun potensi wisata memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilakukan di desa (Nurcholis, 2021).

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat desa yang memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesadaran yang tinggi terhadap pembangunan akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan desa (Widjaja, 2021).

3) Kepemimpinan Pemerintah Desa

Kepemimpinan pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa memiliki peran penting dalam merencanakan serta mengarahkan kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Kepemimpinan yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat serta menciptakan kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat (Solekhan, 2021).

g. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan desa. Masyarakat desa yang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti keikutsertaan dalam musyawarah desa, kontribusi tenaga dalam kegiatan pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan (Nurcholis, 2021).

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa karena masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi serta kebutuhan yang ada di lingkungan mereka. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program pembangunan

desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Solekhan, 2021).

h. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa karena pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk merencanakan serta melaksanakan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa serta memastikan bahwa pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Widjaja, 2021).

Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah desa harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Solekhan, 2021).

1) Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga

program pembangunan yang direncanakan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat (Nurcholis, 2021).

2) Pelaksanaan Program Pembangunan

Setelah perencanaan pembangunan disusun, pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Pelaksanaan program pembangunan harus dilakukan secara transparan serta melibatkan masyarakat agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik (Widjaja, 2021).

3) Pengawasan Pembangunan Desa

Pemerintah desa juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana serta tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan (Solekhan, 2021).

i. Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa

Keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai indikator yang menunjukkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa. Indikator tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur yang menjadi bagian penting dalam pembangunan desa. Dengan adanya indikator keberhasilan pembangunan desa, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat (Widjaja, 2021).

1) Peningkatan Infrastruktur Desa

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah meningkatnya kualitas infrastruktur yang tersedia di desa seperti jalan desa, jembatan, fasilitas air bersih, serta sarana pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Solekhan, 2021).

2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan desa juga dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat desa. Peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan desa mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat (Nurcholis, 2021).

3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan juga menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan di desa (Widjaja, 2021).

3. Pratisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi dalam Bahasa inggris adalah “ Participation’’ artinya suatu kegiatan yang membangkitkan semangat kerja dan dilibatkan dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat juag diartikan sebagai keikut sertaan masyarakat dalam proses penetuan arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan baik itu daerah maupun dari pusat.

Pengertian Partisipasi Menurut (Sanoff, 2000), yang menyebutkan bahwa: “partisipasi merupakan konsep yang sangat umum yang meliputi berbagai bentuk pengambilan keputusan oleh sejumlah kelompok yang terlibat”. Peran serta masyarakat memiliki arti yang berbeda untuk masyarakat yang berbeda, cara untuk berperan serta juga berbeda berdasarkan situasinya. Menurut Mubyarto dalam (Ndraha, 2007) pada jurnal (Revlen Herryanto, dkk., 2020) mengartikan: “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai tujuan dan atau sebagai alat. Artinya melalui partisipasi akan menghasilkan pemberdayaan dan sekaligus berfungsi sebagai alat pelaksanaan program menjadi efisien. Dalam konteks sebab akibat dari logika efisiensi dan pemberdayaan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berdampak positif

terhadapat suatu program dan sebaliknya program menjadi positif apabila ada partisipasi masyarakat.

H.A.R Tilaar,(2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk memgembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi diman diupayakan antara lain diperlukan perecanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembanguan masyarakatnya. Menurut sundariningrum dalam sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (Dua) berdasarkan cara keterlibatan, Yaitu:

1) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses Partisipasi. Parisipasi ini terjadi apapbila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapan.

2). Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2001; dua61-63) membedaka partisipasi menjadi 4 jenis, yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan.Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan.Ketiga, partisipasi dalam pemgambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut (Hamijoyo, 2007) mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut :

1) Partisipasi Pemikiran Partisipasi buah pikiran berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang di ikutinya.
2) Partisipasi Tenaga Partisipasi tenaga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga dalam pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program pembangunan. Adapun indikator dari partisipasi tenaga yaitu :
   a. Kehadiran Secara Fisik Keterlibatan secara fisik, yaitu perihal ikut serta secara langsung dalam suatu pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dengan usaha untuk mencapai tujuanyang diinginkan serta turut bertanggung jawab terhadap berjalannya pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang bersangkutan.
   b. Keterlibatan Secara Fisik Kehadiran secara fisik, yaitu adanya sekelompok orang yang hadir secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan pada suatu tempat.
3) Partisipasi Keterampilan Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang

tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

4) Partisipasi Barang Partisipasi barang merupakan jenis partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk barang yang mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Barang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh anggota yang secara sukarela digunakan untuk keperluan kegiatan atau acara dari kampung kreatif.

5) Partisipasi Uang Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

c. Macam-Macam Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61), partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, kebeerhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

d. Faktor dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Menurut (Slamet, 1993) faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1. Faktor Internal Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan dalam kelompok di dalamnya.
2. Faktor Eksternal Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan pengaruh (*stakeholder*) yaitu yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah desa (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan /fasilitator

4. Masyarakat

a. Definsi Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut Society. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah "kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama" (Sofyan, 2018).

J.L Gillin dan J.P Gillin merumuskan bahwa masyarakat atau society adalah " the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes. And feelings of unity are operative". Unsur grouping dalam definisi itu menyerupai unsur "kesatuan hidup" dalam definisi kita. Unsur common customs, traditions adalah unsur "adat-istiadat", dan unsure "kontinuitas" dalam definisi kita. Serta unsur common attidues and feeling of unity adalah sama dengan unsur " identitas bersama". Suatu tambahan dalam definisi

Gillin adalah unsur the largest yang berarti “ tebesar” (Sofyan, 2018). Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam dalam (Sodik, 2020) mengatakan bahwa masyarakat bisa dikatakan sebagai mahluk yang hidup dan menciptakan kebudayaan.

Menurut (Gillin, J.L dan J.P. Gillin, 1954) mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang tertentu. Anggota masyarakat itu memiliki rasa persatuan dan menganggap mereka memiliki identitas sendiri.

b.Ciri-ciri Masyarakat

Menurut (Soerjono Soekanto, 1986) ciri-ciri masyarakat yaitu sebagai berikut :

1). Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menetukan berapa jumlah manusia yang harus ada.

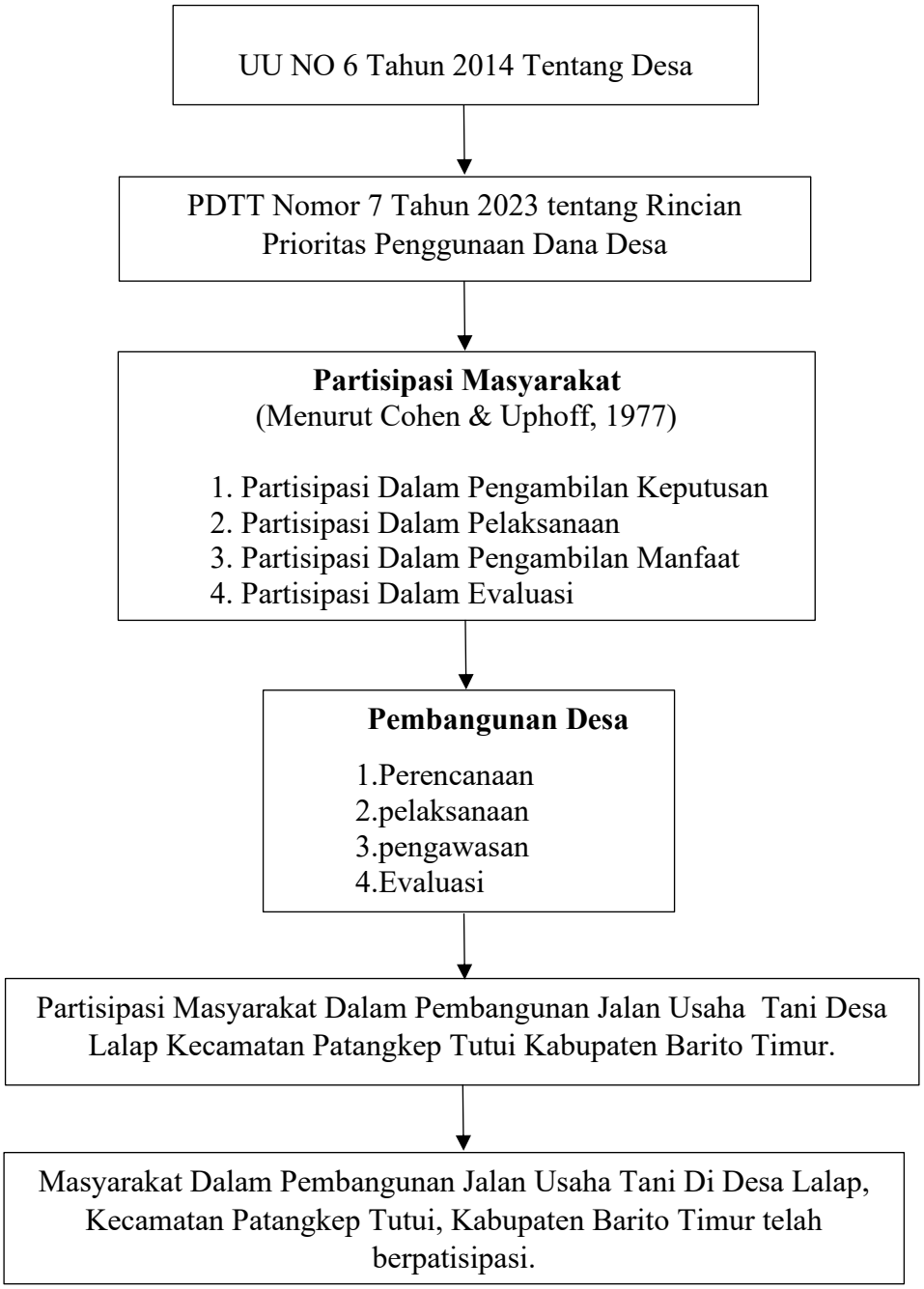
2). Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja, dan sebagainya.

3). Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

4). Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2026